

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akedemi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Abdullah & Febriansyah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18*. Medan.
- Abdullah, Syukriy dan Riza Rona. 2014. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Iqtishadia*: 179-202. Diakses pada Selasa, 24 Januari 2017 dari <https://www.researchgate.net/publication/303961479>.
- Abdullah, S., dan A. Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 (2) : 17-32.
- Bangun, Andrias, 2009. *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintahan Deli Serdang)*. Thesis UNSUT Medan.
- Darmayasa, I.N., dan I. K. Suandi. 2014. Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi Mataram 24-27 September 2014. <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/09/157.pdf>. Diakses tanggal 23 Januari 2015.
- Darsono, I.L. 2013. Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 1(8) : 11-21.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Simposium Nasional Akuntansi X*.

- Darwis, E.T.R. 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1605/1228>. Diakses tanggal 15 April 2015.
- Doyle, M.P., Erickson, M.C. 2006. Closing The Door On The Fecal Coliform Assay. *Microbe* 1
- Erlina. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Kedua. Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gracenov, Gideon. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten Se-Jawa Tengah.
- Imawan, Riswanda, Agus Wahyudin. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis journal*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Jensen, M., and Meckling, W. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3: 305-360.
- Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh". *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 1, No. 1. hal. 15-29.
- Keefer, Philip dan Stuti Khemani. 2003. *The political economy of public expenditures. Background paper for WDR 2004*
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta. Erlangga.
- Kurniawan, A. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Tesis. Universitas Lampung.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Manik, T., dan L. Suprihartini. 2013. Analisis Pengaruh Pelaksanaan Manajemen Publik melalui Pengukuran Value For Money dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Penggunaan Belanja Modal : Studi Empiris di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012. *JEMI 4 (2): 15-30*.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mayasari, L.P.R., N. K. Sinarwati., dan G. A. Yuniarta. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha, 2 (1)*.
- Nasution, N. A., 2010. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Nugroho, F. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting, 1 (2): 1-14*.
- Oktora, F.E., dan W. Pontoh. 2013. Analisa Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Accountanility, 2 (2) : 1-10*
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennyslvania Local Goverment. Unpublished Ph.D Dissertation*. Pennyslvania: The Pennyslvania State University.
- Paujiah, S.P. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya). [journal.unsil.ac.id/download.php?id=367](http://journal.unsil.ac.id/download.php?id=367).
- Putri, Evrintia Dini. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
- Putro, Suratno Nugroho. 2010. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhaap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)". Universitas Esa Unggul: Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

- Republik Indonesia. 2000. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.,
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Rukmana, Wan Vidi. 2013. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji*.hal. 1-15.
- Sarkoro, Hastuti. 2016. "Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2012-2014)".
- Scott, William R. 2011. *Financial Accounting Theory*, 6th Edition, USA: Prentice Hall.
- Sholikhah, I., dan A.Wahyudin. 2014. Analisa Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal* 3(4): 553-562
- Simanullang, G. 2013. Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008-2012. *Umrah Journal of Accounting* 1(1) : 1-24.

- Sugiono, S. 2014. Pengaruh Moderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Hubungan Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2 (3): 1-27.
- Suhardjanto. 2010. Influence of Parliament Characteristic Toward Mandatory Accounting Disclosure Complaine in Indonesia. Hibah Penelitian Publikasi International LP2M UNS.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Susantih, H dan Saftiana, Y. 2009. “Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan”. *Jurnal Program Pascasarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi*. Universitas Sriwijaya.
- Tangkilisan, Hessl Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wandira, A.G. 2013. Pengaruh PAD,DAU,DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2 (1): 44-51.
- Wulandari, A. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Tahun 2003-2011). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

[www.jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id)